



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Rekanan Belum Diperiksa**

**Hitung KN Proyek Jembatan Air Taba Terunjam B CS**

**BENGKULU** - Penyidikan ulang kasus dugaan korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS, dengan nilai kontrak Rp 49 miliar di Kejaksaan Tinggi Bengkulu masih terus bergulir. Bahkan saat ini penyidik tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, untuk menghitung kerugian Negara dari proyek jembatan di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2019 ini.

Selain itu, penyidik juga sudah memeriksa beberapa pihak. Diantaranya rekanan penyedia material dan alat berat.

Kemudian pihak dari Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu. Sedangkan rekanan yang

mengerjakan yakni PT Asria Jaya, belum diperiksa. Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH menyampaikan proyek tersebut memang sudah berstatus Provisional Hand Over (PHO). Atau sudah serah terima pertama antara kontraktor pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen. "Namun belum berstatus FHO, atau serah terima terakhir," kata Danang.

Danang membantah bila pengusutan kasus tersebut stagnan, ia bahkan menegaskan kasus tersebut masuk salah satu atensi. Proses penyidikan saat ini masih dinamis, walaupun sebelumnya sempat disidik Kejari Bengkulu Tengah dan dan Kejari Bengkulu Utara, dan saat ini diambil alih oleh Kejati Bengkulu.

► Baca **REKANAN..**  
Hal 11



Sambungan dari halaman 1

"Saat ini masih pengumpulan keterangan dari sejumlah instansi terkait serta meminta keterangan dari pihak kontraktor," ungkap Danang.

Ketika disinggung apakah proyek tersebut dengan nilai anggaran mencapai Rp 49 miliar lebih dari APBN kekurangan volume dan mutu, hal tersebut tidak dibantah oleh Danang. Ia mengatakan memang penyidik sudah mengantongi perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek tersebut.

Termasuk estimasi dari kerugian keuangan negara. Namun estimasi tersebut belum bisa disampaikan kepada publik, karena ma-

sih dalam teknis penyidikan. "Yang jelas perbuatan melawan hukum itu sudah ada," jelas Danang.

Berdasarkan data yang **RB** peroleh dari website <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/49356064/pengumumanlelang>, nama proyek tersebut yakni Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. CS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu.

Sementara pihak yang telah dilakukan pemeriksaan kata Danang sudah ada dari beberapa pihak terkait. "Dari BPJN sudah ada beberapa yang kita periksa, BPK ke-

mudian KPA, pengawas lapangan, dan Satker (Satuan Kerja, red)," jelas Danang.

Bahkan, kata Danang pihaknya juga telah memeriksa saksi dari pihak swasta. Pihak swasta yang dimaksud Danang merupakan dari pihak ketiga penyedia material dan peralatan pada pekerjaan penggantian. Dari hasil pemeriksaan sementara pihaknya menemukan adanya indikasi kekurangan pada volume konstruksi jembatan tersebut.

"Ada kekurangan volume. Ketidakbenaran dari indikasi kekurangan volume maupun mutunya, masih dalam pengkajian serta perbandingan dengan kerugian negaranya," jelas Danang.

Saat disinggung terkait

kerugian keuangan negara, Danang menyebutkan pihaknya belum bisa menyampaikan. Pasalnya penyidik masih mendalami terkait realisasi anggaran pada proyek tersebut, hingga kondisi fisik jembatan di lapangan.

"Belum bisa disampaikan kalau estimasi kerugian negaranya, karena ada beberapa hal yang kita kaitkan juga dengan sisi keuangan yang sudah direalisasikan mana yang belum. Terus kondisi fisik di lapangannya seperti apa, tapi untuk kepentingan umum mesti kita perhatikan, inikan jembatan jangan sampai penegakan hukum itu malah tidak men-sukseskan pembangunan," demikian Danang. (jam)